

ANALISIS DISKURSUS PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2022

Fredick Broven Ekayanta
Universitas Sumatera Utara
frbrov@usu.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan perspektif analisis diskursus sebagai alat analisis untuk mengkaji politik Indonesia masih relatif jarang dan terbatas dilakukan. Padahal perspektif ini memiliki kelebihan dalam membaca dan menginterpretasikan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi. Tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis apa saja makna yang diproduksi pada pidato kenegaraan presiden tahun 2020-2022, dan mengapa makna tersebut, bukan yang lain, yang ditampilkan, dalam mengkaji politik Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan pidato kenegaraan presiden pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dan data sekunder mengenai kajian politik Indonesia, serta menggunakan analisis diskursus sebagai teknik analisis, tulisan ini berargumen bahwa kondisi struktural kekuasaan yang belum terdistribusi dengan baik menjadikan diskursus-diskursus atau isu-isu politik yang diproduksi negara, masih tidak menyinggung persoalan riil rakyat yang lebih penting, dan terkadang justru mengandung kontradiksi.

Kata Kunci: pidato, diskursus, politik, Indonesia

PENDAHULUAN

Penggunaan perspektif analisis diskursus (wacana) sebagai alat analisis untuk mengkaji politik Indonesia masih relatif jarang dan terbatas dilakukan. Padahal perspektif ini memiliki kelebihan dalam membaca dan menginterpretasikan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Tapiheru & Santoso (2021), bahwa perspektif analisis diskursus didasarkan pada asumsi dasar bahwa semua normalitas tidak pernah terberi, tetapi selalu dikonstruksi melalui wacana sehingga bersifat politis.

Tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis apa saja makna yang diproduksi pada pidato kenegaraan presiden tahun 2020-2022, dan mengapa makna tersebut, bukan yang lain, yang ditampilkan. Dengan perspektif analisis diskursus, jawaban atas pertanyaan tersebut akan menuntun kita untuk mengetahui bagaimana kekuasaan pemerintah dalam membentuk praktik dan rezim yang menjadi bagian dari kehidupan politik di Indonesia sehari-hari.

Pilihan konteks waktu di atas berdasarkan periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), yang sudah berlangsung separuh jalan. Sementara pilihan analisis terhadap pidato kenegaraan adalah mengingat ini adalah momen tahunan yang disampaikan di depan

lembaga legislatif yang menjadi representasi dari rakyat, sehingga memiliki atensi dan *exposure* yang luas. Pidato kenegaraan ini sudah menjadi tradisi untuk menyambut hari kemerdekaan sejak tahun 1967. Pidato presiden sebagai pemimpin negara adalah sesuatu yang penting, dikarenakan negara adalah institusi yang mengatur hampir seluruh dimensi dari kehidupan rakyatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Surahmat (2020) bahwa: “Pidato kenegaraan memiliki posisi khusus karena digunakan sebagai laporan kepala negara kepada lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan rakyat (lembaga legislatif). Pidato kenegaraan menggambarkan pencapaian yang telah diraih dan ambisi yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Sementara menurut Adam (2011), pidato kenegaraan adalah medium penting bagi presiden untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang sesungguhnya terjadi dan ke mana Indonesia hendak dibawa.

KAJIAN LITERATUR

Pendekatan analisis diskursus menyediakan kerangka teoritis dan analisis untuk mengungkapkan bagaimana beroperasinya kekuasaan secara lebih mendalam, melampaui apa yang tampak dan justru ketika segala sesuatu tampak “normal”. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa normalitas bukan sesuatu yang alamiah atau terberi, tetapi hasil dari beroperasinya kekuasaan (Santoso dan Tapiheru 2021).

Ada dua prinsip dalam analisis diskursus. Pertama, gejala sosial dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dinamis sehingga tidak akan pernah selesai dan tidak dapat dipahami secara tuntas keseluruhannya. Maka, pemahaman atas gejala sosial yang diamati selalu bersifat parsial dan temporer. Kedua, makna dapat selalu berubah dan akibat dari dinamika ini selalu ada ruang bagi sejumlah perlawanan sosial dalam proses produksi makna atau definisi. Maka, makna harus dipahami sebagai hasil dari kontestasi kekuasaan dan kepentingan. Tugas analisis diskursus adalah memetakan berbagai kekuasaan dan kepentingan yang berada di balik proses pemaknaan terhadap suatu gejala sosial (Raffudin 2014).

Dalam khazanah teori-teori diskursus, dunia diasumsikan memiliki berbagai bentuk diskursus. Diskursus-diskursus tersebut tidak statis, dimana antara yang satu dengan yang lain berlangsung pertarungan untuk menjadi dominan. Pertarungan ini disebut pertarungan diskursif. Tujuan dari pertarungan tersebut adalah untuk merebut hegemoni. Laclau dan Mouffe menyebutkan bahwa diskursus merebut hegemoni terhadapi pada fenomena yang melekat pada praktik politik apapun. Dalam proses membangun diskursus, ada praktik yang disebut sebagai artikulasi. Artikulasi dapat dipahami sebagai kegiatan/praktik apa pun yang membangun relasi di antara elemen, termasuk identitas, yang merupakan hasil dari modifikasi kegiatan berwacana/berartikulasi (Savirani 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis diskursus yang dibentuk oleh negara sebagai pemilik kekuasaan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hegemoni terhadap berbagai diskursus dalam kehidupan politik masyarakat. Tempus (cakupan) dari penelitian ini adalah antara tahun 2020 hingga 2022, sehingga sumber data yang digunakan dalam membangun argumentasi tulisan ini adalah pidato kenegaraan presiden pada tahun 2020, 2021, dan 2022, yang diunduh dari situs Sekretariat Negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder berupa hasil penelitian yang terkait dengan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu yang sama.

Analisis diskursus merupakan praktik menganalisis bahan mentah dan informasi empirik sebagai bentuk diskursif. Diskursif disini dipahami sebagai cakrawala teoritis di mana keberadaan benda/objek dibentuk (Howarth, Norval, dan Stavrakakis 2000). Oleh karena itu teknik analisis data dalam tulisan ini menggunakan dua tahap “membaca” dalam analisis diskursus. Pertama, dengan membaca data secara sederhana dan literer atau apa yang tersaji secara kasat mata. Sehingga, pada tahap ini peneliti masih mengikuti interpretasi dominan terhadap “teks” yang diamati. Dari hasil pembacaan tersebut, peneliti melakukan pengelompokan data sebelum menganalisis dan memvalidasi data. Setelah itu, peneliti melakukan pembacaan tahap kedua, yaitu menemukan apa yang tidak disampaikan/dipinggirkan/diabaikan atau yang tidak muncul secara kasat mata dalam “teks” yang diamati. Temuan itu akan menjadi acuan dalam menganalisis relasi kekuasaan antara yang dominan dan korban penindasan dari pemilik kuasa yang dominan (Raffiudin 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Artikulasi pada Pidato Kenegaraan Tahun 2020, 2021, dan 2022

Pada bagian ini, peneliti menjabarkan isu-isu apa yang diartikulasikan dalam teks pidato kenegaraan tahun 2020, 2021, dan 2022. Tulisan ini berargumen bahwa isu dalam pidato-pidato tersebut adalah isu yang hendak dijadikan menjadi hegemoni dalam diskursus politik Indonesia. Isu tersebut juga menjadi kepentingan yang diprioritaskan oleh pemerintah.

Pada pidato tahun 2020, isu pandemi yang menimbulkan krisis menjadi pembuka teks pidato presiden. Situasi pandemi dijadikan momentum untuk melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja, terutama di sektor kesehatan, pangan, energi, dan industri. Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi ini adalah melalui penataan regulasi agar tidak tumpang tindih, merumitkan, dan menjebak semua pihak dalam risiko. Reformasi fundamental ini bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif. Seiring dengan itu, presiden juga mengajak untuk menumbuhkan ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Pada bagian berikutnya, presiden mengungkapkan bahwa tujuan di atas hanya tercapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa. Demokrasi diakui menjamin kebebasan tetapi kebebasan yang menghargai hak orang lain. Presiden juga mengapresiasi dukungan legislatif

kepada pemerintah dalam menangani pandemi, seperti menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, serta agenda legislasi yang lain seperti RUU Mineral dan Batu Bara. Di bagian akhir pidato, presiden menyinggung kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.

Pidato tahun 2021 juga diawali dengan tantangan yang dihadapi Indonesia seperti pandemi, krisis, dan resesi. Untuk mengatasinya, presiden menyebut perlunya bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 agar bisa bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif. Di bagian berikutnya, pidato berisi pelibatan masyarakat, TNI, Polri, dan birokrasi dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian, terutama pemerintah yang bekerja keras mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Setelah itu, presiden menekankan kembali agenda besar menuju Indonesia Maju dengan pengembangan SDM berkualitas sebagai prioritas. Di samping itu, pembangunan ekonomi tetap menjadi agenda utama. Pembangunan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur, adalah cara yang dipilih pemerintah rezim Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia. Pandemi memaksa pemerintah memberikan bantuan sosial melalui berbagai program, serta dijadikan momentum untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru. Oleh karena itu, di bagian berikutnya presiden menceritakan perkembangan investasi. Di bagian akhir, pidato berisi apresiasi terhadap kinerja berbagai lembaga negara serta ajakan untuk berpegang teguh pada nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila.

Pidato tahun 2022 diawali dengan pengalaman Indonesia yang dianggap mampu menghadapi krisis global karena berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Kemampuan mengelola pandemi dinilai menjadi modal untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah, dengan penekanan harus dihilirisasikan dan diindustrikan di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Selain itu Indonesia memiliki kekuatan pada bonus demografi dan kepercayaan internasional, yang dapat dikapitalisasi menjadi peluang untuk mencapai kepentingan nasional. Ada lima agenda besar dalam membangun Indonesia yang ditekankan pada pidato kali ini, yaitu hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat (seperti pemberantasan korupsi, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, dan reforma agrarian), dukungan kepada UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lima agenda besar tersebut ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul, yang dicapai dengan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Di bagian selanjutnya, pemilu diharapkan tidak diwarnai politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial lagi. Di bagian akhir, isu geopolitik dunia yang mengancam keamanan kawasan disebutkan.

Tabel. Kata Kunci Utama Pidato Kenegaraan 2020-2022

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
----	------------	------------	------------

	Kata	Frekuensi	Kata	Frekuensi	Kata	Frekuensi
1	Kerja	21	Pandemi	31	Dunia	16
2	Krisis	14	Ekonomi	20	Ekonomi	14
3	Ekonomi	14	Kesehatan	19	Krisis	11
4	Kesehatan	12	Kerja	18	Agenda	8
5	Pembangunan	10	Covid-19	9	Global	7

Sumber: *Harian Kompas*, 18 Agustus 2022, hal 3

Dari tiga tahun pidato kenegaraan tahun 2020-2022, ada perbedaan kata kunci yang paling sering diartikulasikan presiden. Jika kata “kerja” dan “pandemi” menjadi kata kunci tersering diucapkan pada pidato kenegaraan tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 kata kunci yang menonjol adalah “dunia”. Pidato kenegaraan tahun 2020 dan 2021 merupakan pidato kenegaraan yang disampaikan di dua tahun pertama saat pandemi Covid-19 terjadi, sehingga isu-isu mengenai strategi penanganan pandemi dan pemilihan dari krisis menjadi dominan. Hal ini berbeda dengan pidato-pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi pada periode pertamanya (2014-2019), yang menunjukkan dominannya kata-kata seperti ekonomi, pembangunan, dan infrastruktur. Ini tidak terlepas dari strategi dan kepentingan pemerintah yang mengejar pembangunan infrastruktur fisik (Ekayanta 2019). Sementara pada tahun 2022, kata-kata kunci yang dominan tidak terlepas dari kiprah Indonesia di dunia internasional seperti status sebagai Ketua Kelompok G20 dan Ketua ASEAN di tahun 2023.

Isu-isu yang Dipinggirkan pada Pidato Kenegaraan Tahun 2020, 2021, dan 2022

Setelah menjabarkan isu-isu yang ditampilkan di pidato kenegaraan pada bagian sebelumnya, bagian ini menjabarkan isu-isu politik penting yang tidak ditampilkan atau disingkirkan dari teks pidato tersebut. Isu-isu inilah yang kemudian dianggap bukan kepentingan pemerintah, atau memang disengaja untuk tidak ditampilkan.

Terkait dengan penanganan pandemi, Fealy (2020) berargumen bahwa pemerintah lebih memprioritaskan aktivitas ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat. Ini tercermin dalam komposisi Tim Pemulihan Ekonomi dan Satuan Tugas Covid-19 yang dibentuk yang lebih didominasi oleh para ekonom dan pebisnis ketimbang ahli kesehatan. Pemerintah pun lebih mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan pandemi, dengan melibatkan militer maupun intelijen. Isu penting lain yang disebutkan Fealy pada politik Indonesia tahun 2020 adalah meningkatnya tendensi dinasti politik yang berkompetisi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, termasuk dari presiden itu sendiri. Secara keseluruhan, Fealy menyatakan bahwa krisis pandemi justru mengakselerasi tendensi otokrasi yang telah berlangsung di Indonesia.

Sementara itu, pada refleksi politik tahun 2021, Setijadi (2021) berpendapat pandemi memberi kesempatan kepada presiden dalam mengkonsolidasi kekuasaannya. Padahal, Indonesia yang telah

menghadapi pandemi gelombang kedua membuka masalah akses yang tidak setara di masyarakat terhadap layanan kesehatan. Setjadi juga berpendapat bahwa pemerintah memandang pandemi sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi paling utama pada masa pandemi ini adalah pengesahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatukan lebih dari 70 regulasi di bidang investasi, ketenagakerjaan, perpajakan, dan isu lingkungan. Padahal UU tersebut mendapat protes dari banyak kalangan masyarakat sipil, terutama serikat buruh dan organisasi non pemerintah di bidang lingkungan. Penanganan pandemi yang melibatkan polisi, militer, dan intelijen juga berlanjut di tahun 2021, sehingga kebijakan ini dinilai membuat demokrasi justru terdekonsolidasi. Pada akhirnya, Setjadi berkesimpulan bahwa Presiden Jokowi berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya yang ditandai dengan tingginya popularitasnya, besarnya dukungan koalisi di parlemen, dan tidak memiliki oposisi yang efektif.

Dalam analisis Maqoma (2021) terhadap pidato kenegaraan tahun 2015-2021, presiden menyinggung masalah ekonomi, industri, dan infrastruktur sebagai isu yang dominan dan disebutkan hingga 66 kali, sementara isu lingkungan hanya disebut tiga kali dalam rentang waktu tersebut. Demikian pula respon dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melalui siaran persnya yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu katapun terkait perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dalam pidato kenegaraannya. Terkait dengan pandemi, pemerintah disebut tidak menyinggung dan tidak mengakui kegagalannya dalam pandemi (gagal mengendalikan harga masker, oksigen, tes, hingga korupsi bantuan sosial) (walhi.or.id 2021). Sebuah analisis juga berpendapat bahwa pidato kenegaraan di tahun 2021 tidak berisikan hal-hal yang penting dan memiliki banyak kontradiksi. Beberapa isu penting yang tidak disampaikan adalah kekerasan dan masalah hak asasi manusia kepada para jurnalis, pemberantasan korupsi, krisis iklim, aktivitas perekonomian di bidang ekstraktif dan eksploitasi yang merusak sumber daya dan lingkungan, kecenderungan sentralisasi kewenangan yang menyebabkan berkurangnya keterlibatan pemerintah daerah, serta kelonggaran peraturan lingkungan (Wicaksono 2021).

Isu terpenting yang menjadi perhatian banyak ilmuwan sosial politik, tetapi diabaikan dalam pidato kenegaraan, pada beberapa tahun terakhir adalah buruknya situasi demokrasi di Indonesia yang tengah mengalami kemunduran yang sangat serius (Wijayanto, Budiatri, dan Wiratman 2021). Beberapa tahun terakhir, banyak kajian yang menyoroti menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, seperti kumpulan tulisan yang disunting oleh Power dan Warburton (2021) yang berjudul *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* dan karya Davidson (2022) berjudul *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi*. Kajian-kajian mengenai penurunan kualitas demokrasi yang menggunakan perspektif liberal-pluralis memiliki asumsi bahwa demokrasi di Indonesia memiliki trajektori dari transisi, ke konsolidasi, dan pendalaman. Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi Indonesia tidak bergerak ke arah pendalaman demokrasi, tetapi justru mengarah pada dekonsolidasi. Kondisi inilah yang juga menjelaskan mengapa isu-isu penting dan prinsipil dalam demokrasi seperti perpanjangan masa

jabatan presiden ataupun penundaan pemilihan umum yang sempat ramai pada awal 2022 tidak disinggung sama sekali dalam pidato kenegaraan.

Sementara itu kajian-kajian yang menggunakan pendekatan ekonomi politik struktural, sejak awal sudah memprediksi bahwa demokratisasi di Indonesia memang bermasalah (Hadiz 2010), dan belum ada tanda-tanda baik bahwa transformasi ke arah perubahan struktur kekuasaan yang lebih merata akan terjadi. Pendekatan ekonomi politik struktural akan memberikan jawaban yang lebih jelas terkait mengapa kemudian isu-isu demokrasi terpinggirkan oleh isu-isu dominan dalam pidato kenegaraan presiden. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Anugrah (2014) bahwa persoalan utama politik Indonesia adalah secara struktural, tidak banyak yang berubah dari konstelasi politik yang masih didominasi oleh sejumlah elite yang (secara langsung maupun tidak langsung) melanggengkan teknorasi kapital di dalam ranah demokrasi elektoral.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa kondisi struktural kekuasaan yang belum terdistribusi dengan baik menjadikan diskursus-diskursus atau isu-isu politik yang diproduksi negara, melalui pidato kenegaraan, masih tidak menyinggung persoalan riil rakyat yang lebih penting, dan terkadang justru mengandung kontradiksi. Makna dominan yang diartikulasikan melalui pidato kenegaraan tahun 2020 hingga 2022 masih didominasi oleh istilah perekonomian, sementara kata “krisis” dan “pandemi” muncul berkaitan dengan konteks pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Akan tetapi, makna yang ditampilkan adalah peran dan klaim keberhasilan negara dalam menangani pandemi. Padahal jika “dibaca” lebih lanjut, pandemi justru dimanfaatkan untuk mengkonsolidasi kekuasaan yang kemudian menghasilkan penurunan kualitas demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adam, Asvi Warman. 2011. “Salah Kaprah Pidato Kenegaraan”. *Koran Tempo*. 18 Agustus.
- Anugrah, Iqra. 2014. “Menyambut 2014”, <https://iqraanugrah.com/2014/01/22/menyambut-2014/>.
- Davidson, Jamie. 2022. *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Ekayanta, Fredick Broven. 2019. “Ideology and Pragmatism: Discourse Factors in Infrastructure Development in Indonesia’s Jokowi-JK Era”. *Jurnal Politik*, Vol 4, No 2, 297-
- Fealy, Greg. 2020. “Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism, and the Overbearing State”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 56, No 3, 301-323.
- Hadiz, Vedi. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.

- Howarth, David, Aletta Norval, dan Yannis Stavrakakis (ed). 2000. *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies, and Social Change*. Manchester dan New York: Manchester University Press.
- Maqoma, Robby Irfany. 2021. “Di tengah ancaman pemanasan global, pidato kenegaraan Jokowi hanya sekali menyinggung isu iklim – ekonomi disebut 66 kali”. *The Conversation*. <https://theconversation.com/di-tengah-ancaman-pemanasan-global-pidato-kenegaraan-jokowi-hanya-sekali-menyinggung-isu-iklim-ekonomi-disebut-66-kali-166215>.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT Ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI. 2020. Diunduh dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_pada_sidang_tahunan_mpr_ri_dan_sidang_bersama_dpr_ri_dan_dpd_ri_dalam_rangka_hut_ke_75_proklamasi_kemerdekaan_republik_indonesia.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT Ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI. 2021. Diunduh dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_pada_sidang_tahunan_mpr_ri_dan_sidang_bersama_dpd_ri_dan_dpr_ri_dalam_rangka_hut_ke_76_proklamasi_kemerdekaan_ri.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI. 2022. Diunduh dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_pada_sidang_tahunan_mpr_ri_dan_sidang_bersama_dpr_ri_dan_dpd_ri_dalam_rangka_hut_ke_77_proklamasi_kemerdekaan_ri.
- Power, Thomas dan Eve Warburton (ed). 2021. *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?*, Jakarta: KPG, Public Virtue, dan Kurawal Foundation.
- Raffiudin, Riady (ed). 2014. *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Depok: Puskapol UI.
- Santoso, Purwo dan Joash Tapiheru. 2021. “Memahami Politik Pemerintahan Melalui Makna: Hegemoni, Subjektifikasi, dan Afeksi”, dalam Mas,udi, Wawan & Abdul Gaffar Karim (editor). *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik & Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Savirani, Amalinda. 2017. “Pertempuran Makna “Publik” dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta”. *Prisma*, Vol 36, No 1, 112-126.
- Setijadi, Charlotte. 2021. “The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi’s Indonesia in the Time of Covid-19”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 57, No 3, 297-320.
- Surahmat. 2020. “Analisis pidato kenegaraan Jokowi ungkap keterbatasan pemerintah dalam hadapi pandemi”. *The Conversation*. <https://theconversation.com/analisis-pidato-kenegaraan-jokowi-ungkap-keterbatasan-pemerintah-dalam-hadapi-pandemi-145340>.

- Tapiheru, Joash dan Purwo Santoso. 2021. “Wacana sebagai Objek Kajian: Ulasan Kajian dengan Analisis Wacana di DPP UGM dan Arah Pengembangan ke Depan”, dalam Mas,udi, Wawan & Abdul Gaffar Karim (editor). *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik & Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- *Walhi.or.id*. “Merespon Pidato Kenegaraan Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021”. <https://www.walhi.or.id/merespon-pidato-kenegaraan-jokowi-di-sidang-tahunan-mpr-2021>.
- Wicaksono, Raden Ariyo. “Ramai-Ramai Kritik Pidato Kenegaraan Presiden”, *betahita.id*, <https://betahita.id/news/lipsus/6458/ramai-ramai-kritik-pidato-kenegaraan-presiden.html?v=1633040420>

